



**Pansus LKPJ DPRD Kota Jogja Ungkap Berbagai Temuan
Agendakan Gelar Uji Publik,
Terima Laporan Penyunatan Jadup**

**RAPAT DENGAR
PENDAPAT
UMUM (RDPU)**
Jumat 9 April 2021

Masukan dan laporan disampaikan masyarakat:

- 1 Adanya keluhan menyangkut dugaan terjadinya penyunatan jatah hidup (jadup) saat pandemi Covid-19.
- 2 Laporan menyangkut pelaksanaan program Gandeng Gendong yang dicitrakan Pemkot Jogja.

Elemen masyarakat diundang:
Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) se-Kota Jogja

Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jogja Tahun Anggaran (TA) 2020 telah dibentuk DPRD Kota Jogja. Awal kerjanya pansus langsung mengadakan rapat kerja. Tajuknya rapat dengar pendapat umum (RDPU).

RDPU itu diadakan pada Jumat 9 April lalu. Ada berbagai masukan dan laporan disampaikan masyarakat. Di antaranya, Krisma mencatat adanya keluhan menyangkut dugaan terjadinya penyunatan jatah hidup (jadup) saat pandemi Covid-19. Di samping itu, ada pula laporan menyangkut pelaksanaan program Gandeng Gendong yang dicitrakan Pemkot Jogja. "Ada berbagai elemen masyarakat yang kami undang. Antara lain dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) se-Kota Jogja," ujar Ketua Pansus LKPJ R. Krisma Eka Putra kemarin (22/4).

Soal laporan penyunatan jadup, Krisma memilih bertindak hati-hati. Dia tidak ingin gegabah dengan langsung merespons pengaduan tersebut. Pansus meminta agar laporan disampaikan lebih lengkap. Hal ini perlu dilakukan demi memudahkan dewan menindaklanjuti laporan tersebut. "Kami akan lakukan klarifikasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait dengan masalah tersebut," kata alumni Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mataram Yogyakarta (UWMY) ini.

Krisma tidak ingin menduga-duga. Baginya perlu pendalaman atas laporan tersebut. "Apakah benar demikian, misalnya memang ada potongan untuk pajak atau bagaimana. Hasilnya nanti akan kami laporkan kepada masyarakat," ujar politisi yang tinggal di Ndalem Kaneman, Kemantren Kraton, Jogja ini.

Soal program Gandeng Gendong juga menjadi sorotan. Utamanya menyangkut kemitraan antara Pemkot dengan masyarakat. Selama ini berbagai OPD di lingkungan Pemkot kerap membeli pangan atau makan kecil untuk kepentingan rapat. Penganaan itu disediakan oleh kelompok usaha kecil atau PKK di sejumlah kampung. Meski kerap mendapatkan pesanan, mereka curhat ke dewan. "Proses pembayarannya dinilai terlalu lama. Banyak pelaku usaha kecil yang menjerit," beber pria yang masih trah HB VII ini.

Baca Agendakan... Hal 7

NIP. 19690723 199605 1 005



Agendakan Gelar Uji Publik, Terima Laporan Penyunatan Jadup

Sambungan dari hal 1

Mendengar curhat itu, kader Partai Gerindra ini ingin Pemkot menemukan solusi. Proses pembayaran atas pesanan ke pelaku usaha kecil dipercepat. "Prinsipnya mbayar-nya jangan lama-lama. Makin cepat makin baik," harap dia. Selain dua laporan itu, pansus juga hendak mengelaborasi dengan temuan BPK atas laporan keuangan Pemkot Jogja TA 2020. Ada sejumlah temuan yang dire-

komendasikan BPK. "Temuan itu harus ditindaklanjuti," ujar pria yang lulus dari kuliah langsung terpilih sebagai anggota DPRD Kota Jogja periode 2019-2024 ini. Salah satu temuan yang menonjol adalah keengganan beberapa rekanan yang mengerjakan kegiatan dalam rangka penanganan Covid-19. Dari temuan BPK ada sejumlah rekanan yang enggan menyerahkan daftar harga beberapa barang. "Sudah diberi kesempatan BPK tetap

saja bandel. Ngeyel nggak mau menyerahkan," ungkapnyanya. Dalam catatan BPK, Pemkot telah berupaya keras menjalankan rekomendasi tersebut. Namun sebagian rekanan bersikap sebaliknya. "Sedang kami pertimbangkan. Apakah perlu beberapa rekanan itu kami undang. Semua bergantung rapat dan kesepakatan anggota pansus," jelas Krisma. Awal pekan depan pansus mengadakan rapat internal. Dilanjutkan rapat kerja dengan pem-

kot. Setelah itu pada akhir bulan ini pansus akan mengadakan rapat kerja dengan mengundang masyarakat kembali. Rapat kerja itu dinamakan uji publik. "Uji publik itu sebagai pertanggungjawaban kami menindaklanjuti laporan masyarakat saat RDPU," terangnya. Usai uji publik pansus bakal menyampaikan laporan ke paripurna. Rekomendasi pansus disampaikan ke wali kota untuk ditindaklanjuti. (kus/prs/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005